Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasuruan, Wujudkan Sistem Pemerintahan Transparan dan Akuntabel

Senin, 26 April 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkomitmen mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna mencegah Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini ditegaskan oleh Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, dalam acara Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Pasuruan. Acara yang dihadiri oleh Koordinator Supervisi Wilayah KPK RI, Erwin Noorman, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, serta seluruh kepala OPD, menekankan pentingnya pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai langkah awal untuk menghindari KKN.

Bupati Irsyad Yusuf secara aktif memantau LHKPN dan mendorong para pejabat untuk melaporkan harta kekayaannya dengan jujur dan tepat waktu. Ia menekankan pentingnya kegiatan koordinasi dan evaluasi ini untuk meningkatkan efektivitas program pemberantasan korupsi di Kabupaten Pasuruan. Bupati juga mengingatkan bahwa visi dan misi pemerintahannya, yaitu mengelola pemerintahan dengan baik, transparan, dan akuntabel, menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan.

Bupati menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Ia meminta kepada seluruh OPD untuk mengelola keuangan dengan bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang berlaku. Melalui transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat meminimalkan risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan KPK dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.